

**FORM BA-5.1-KWK MENJADI SENGKETA DALAM
TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN
CALON INDEPENDEN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT PERIODE 2021 - 2026**

**(Studi Pada Pasangan Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum
dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si)**

SKRIPSI



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2021**

ABSTRAK

Haris Dwinas Saputra, 1710812009. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Skripsi: *Form BA-5.1-KWK Menjadi Sengketa Dalam Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Independen Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 – 2026 (Studi Pada Pasangan Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si). Pembimbing: Dr. Bob Alfiandi, M.Si*

Sesuai dengan konstitusi Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila. Namun demokrasi di Indonesia mengalami pembajakan, dimana para elite atau aktor dominan cenderung memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya. Munculnya pasangan calon independen sebagai kritik keras atas ketertutupan rekomendasi yang diberikan partai politik. Calon independen masih sulit mengungguli calon dari partai politik karena adanya kompromi dan *bargaining* politik. Pasangan Fakhrizal dan Genius Umar adalah calon independen pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, namun gagal melewati tahap verifikasi dukungan dikarenakan *Form* ini dimaknai berbeda oleh setiap pihak sehingga menyebabkan sengketa dan diasumsikan sebagai penyebab kegagalan calon independen yaitu pihak pasangan calon Fakhrizal dan Genius Umar yang ikut serta pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Fokus penelitian ini adalah mengetahui mengapa *Form BA-5.1-KWK* dimaknai berbeda oleh setiap pihak dalam penggunaannya saat verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat.

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Mendeskripsikan mengapa *Form BA-5.1-KWK* menjadi sengketa dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat Periode 2021 – 2026 dan (2) Mendeskripsikan dan makna yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat pada saat mengaplikasikan *Form B.A.1-5 KWK* dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat Periode 2021 - 2026. Teori yang digunakan adalah teori *Interaksionis Simbolik* dari Herbert Blumer, yang menjelaskan tentang interaksi manusia dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan metode kualitatif, yang mana data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, dan pengumpulan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan *Form BA-5.1-KWK* menjadi sengketa pada tahapan verifikasi dukungan calon independen pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Periode 2021-2026 adalah karena adanya perbedaan makna yang dikonstruksikan oleh setiap pihak pada saat memaknai *Form BA-5.1-KWK* saat diaplikasikan oleh KPU Sumatera Barat, tidak adanya landasan hukum dalam penggunaan *Form BA-5.1-KWK*, tidak melakukan sosialisasi kepada bakal calon independen, ada pihak yang merasa dirugikan, dan adanya perbedaan kepentingan dari tiap pihak..

Kata Kunci; *Form BA-5.1-KWK*, Sengketa, Gubernur dan Wakil Gubernur

ABSTRACT

Haris Dwinas Saputra, 1710812009. Thesis Title: *Form BA-5.1-KWK Became a Dispute in the Factual Verification Stage of Independent Candidate Support in the Election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra Province in the Period 2021 – 2026 (Studies in Couples Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si). Advisor: Dr. Bob Alfiandi, M.Si. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University.*

In accordance with the Indonesian constitution, the Pancasila Democracy system is adopted. However, democracy in Indonesia is experiencing piracy, where elites or actors tend to take advantage of democracy for their own and their group's interests. The emergence of independent candidates is a strong criticism of the closeness of recommendations given by political parties. Independent candidates still find it difficult to outperform candidates from political parties because of compromises and political negotiations. The pair Fakhrizal and Genius Umar were independent candidates in the election for the Governor and Deputy Governor of West Sumatra in 2020, but failed to pass the support stage because this form was interpreted differently by each party causing a dispute and was assumed to be the cause of the failure of the independent candidates, namely the candidate pairs Fakhrizal and Genius Umar who participated in the election for the Governor and Deputy Governor of West Sumatra in 2020. The focus of this study is why the BA-5.1-KWK Form is interpreted differently by each party in the use of factual levers by the General Election Commission (KPU) of West Sumatra.

The objectives of this study are (1) to describe why Form BA-5.1-KWK became a dispute in the factual verification stage of support for independent candidates in the election for the Governor and Deputy Governor of West Sumatra province for the period 2021-2026 and (2) Describe and the meaning built by the Election Commission General (KPU) of West Sumatra when applying Form BA1-5 KWK in the factual verification stage of independent candidate support in the election for the Governor and Deputy Governor of West Sumatra province for the period 2021 - 2026. The theory used is the Symbolic Interactionist theory from Herbert Blumer, which explains about human interaction is bridged by the use of symbols. The method used to obtain data is qualitative methods, in which data obtained from in-depth interviews, observations, and secondary data collection.

The results showed that what caused Form BA-5.1-KWK to become a dispute at the stage of verification of support for independent candidates in the election for governor and deputy governor of West Sumatra for the period of 2021-2026 was due to differences in the meaning constructed by each party when interpreting Form BA-5.1- When KWK was applied by the West Sumatra KPU, there was no legal basis for using Form BA-5.1-KWK, did not conduct socialization to prospective independent candidates, there were parties who felt disadvantaged, and there were differences in the interests of each party.

Keywords: Form BA-5.1-KWK, Dispute, Governor and Deputy Governor